

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Naker**

#### **3.1.1 Permasalahan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM**

- 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola keuangan sistem akuntansi Koperasi, sehingga Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah belum efektif;
- 2) Rendahnya penerapan manajemen pengelolaan akuntansi Koperasi dengan menggunakan IT;
- 3) Rendahnya Pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan keuangan koperasi;
- 4) Rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi;
- 5) Belum otonominya pengelolaan keuangan Unit Usaha Simpan Pinjam, sehingga dalam pengelolaan USP masih dirangkap oleh pengurus Koperasi;
- 6) Data Koperasi dan UMKM belum akurat.

#### **3.1.2 Permasalahan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM**

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga kerja yang terampil;
- 2) Terbatasnya akses Pemasaran produk UMKM;

- 3) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, sehingga belum mampu menjangkau seluruh desa/ kecamatan yang berpotensi;
- 4) Kurangnya Motivasi, dan jiwa wirausaha para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya;
- 5) Pada umumnya pelaku UMKM tidak memiliki agunan secara hukum ( Sertifikat tanah ) untuk akses permodalan melalui bantuan kredit le Bank maupun lembaga non Bank;
- 6) Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, lembaga Non Bank dengan Dinas Teknis di Kabupaten/Kota;
- 7) Belum Optimalnya Kemitraan antara Koperasi dengan BUMN dan BUMS dalam fasilitasi permodalan bagi KUMKM.

### 3.1.3 Permasalahan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

- 1) Tingginya tingkat pengangguran, akibat dari tidak seimbangnya pencari kerja dengan kesempatan lapangan kerja;
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan keterampilan, produktivitas angkatan kerja dan pekerja;
- 3) Terbatasnya lapangan kerja sektor informal dan di pedesaan;
- 4) Rendahnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik yang bekerja di dalam Negeri maupun di luar Negeri;
- 5) Keterbatasan informasi ketransmigrasian dan lokasi target penempatan calon transmigrasi;
- 6) Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan keterampilan / keahlian masyarakat di lokasi Transmigrasi lokal ( Translok );

- 7) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### 3.2.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “ *Tasikmalaya yang religius/islami, dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis perdesaan*”.

#### 3.2.2. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Berdasarkan program prioritas Bupati, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai program “*Tasik Siap*” . TASIK SIAP mengandung spirit kesiapan kepemimpinan dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. TASIK SIAP terdiri atas:

1. SIAP 1: Memastikan pemenuhan standar pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar
2. SIAP 2: Menjadikan sumberdaya manusia berakhlak dan berkualitas
3. SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif
4. SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi

Berdasarkan Misi dan Program prioritas Bupati "TASIK SIAP" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mengacu pada Misi 1 dan Misi 2 serta SIAP 2 dan SIAP 3.

### 3.2.3. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
<b>Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak-karimah dan Berkualitas</b>	
T.1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera	S.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan
	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	S.4. Meningkatnya pengarusutamana gender, perlindungan perempuan dan anak.
<b>Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata</b>	
T.2. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata	S.5. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan
	S.6. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

Tujuan	Sasaran
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>	
T.3. Meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	S.7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	S.8. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
<b>Misi 4: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang Berkelanjutan</b>	
T.4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan ruang terpadu	S.9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
	S.10. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang aman dan sehat
	S.11. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
	S.12. Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu

Tujuan dan sasaran Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Adalah Tujuan 1 yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berahlaq mulia dan sejahtera dengan sasaran 3 yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Tujuan 2 yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata dengan Sasaran 6 yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat.

## Hambatan dan peluang

Hambatan dan peluang Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Hambatan.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Secara umum Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini :



### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga kerja

Renstra Kementerian Tenaga Kerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja;	Fasilitas Program dan Pendampingan ;pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi local, pengembangan kewirausahaan	Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas melalui penciptaan kewirausahaan
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Perluasan Penciptaan Kesempatan Kerja di dalam dan luar negeri
3	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek

### 3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Pembangunan Pedesaan	Program pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi
2	Mengembangkan Kawasan transmigrasi yang mandiri sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi	Berkembangnya masyarakat dan Kawasan transmigrasi yang Terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing		Program Pembinaan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi

Berdasarkan telaahan renstra Kementrian, maka dapat diperoleh masalah serta faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

A. Masalah yang dihadapi

1. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif serta berkurangnya jumlah koperasi pasca adanya pembubaran Koperasi.
2. Kurangnya daya saing UMKM disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM, serta kurangnya permodalan dan pemasaran.
3. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja.
4. Masih terbatasnya pengiriman transmigran karena terbatasnya kuota pengiriman transmigran.

B. Faktor Penghambat

1. Kurangnya pertumbuhan koperasi baru.
2. Rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM.
3. Terbatasnya kesempatan kerja.
4. Kurangnya minat dari masyarakat untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru.
5. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi calon transmigran.

C. Faktor Pendorong

1. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sangat luas sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya Koperasi dan UMKM baru.
2. Iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya terus ditingkatkan oleh Pemerintah sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan kesempatan berusaha bagi Koperasi dan UMKM.



3. Adanya program prioritas menumbuhkan pariwisata dengan ditopang infrastruktur yang baik dapat meningkatkan peran serta Koperasi dan UMKM.

### 3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan keberadaan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Revisi Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
3. Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar
4. Ketahanan Pangan
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
7. Pengembangan destinasi wisata
8. Peningkatan daya saing produk pertanian
9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif.
2. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal.
3. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
4. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan.
5. Terbatasnya kesempatan kerja dan kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.
6. Kurangnya kompetensi dan kualitas tenaga kerja.
7. Terbatasnya wilayah tujuan transmigrasi dan pengiriman transmigran.